

# PERAN BAPPLITBANGDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASAR BINAYA MASOHI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Indy Alia Syaira Djumati

NPP. 30.1385

*Asdaf Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan masyarakat*

Email: indyasyr@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Suaib Ibrahim M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** How the Regional Development Planning and Development Agency plays a role in planning the infrastructure development of the Binaya Masohi market along with the obstacles that occur in development and the efforts made. Seeing that in the Central Maluku district, Binaya Market is a shopping center for the community, it is important to pay attention and increase development of the Binaya market **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the role of Bapplitbangda towards development planning at Binaya Market and what are the obstacles in development planning and efforts made to overcome them. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that the role of Bapplitbangda of Central Maluku Regency has met the indicators but not maximized. However, the implementation of its main tasks and functions is going well. This is supported by the role in development planning that Bapplitbangda of Central Maluku Regency carries out Musrenbang and absorbs community aspirations in a good and directed manner. In the development of this Binaya market, there needs to be feedback from the existing community, both from traders and from visitors to this market, because the government is also in balancing this market, it needs to contribute thoughts from the community so that there are innovations for balancing this market. **Conclusion:** The role of Bapplitbangda in Binaya Market infrastructure development planning has not been fully maximized in planning infrastructure development in Binaya Market. However, the implementation of its main tasks and functions as a technical institution for regional development planning is going well. In the development of the market, the community has been able to conduct good buying and selling transactions through the emotional relationships that exist between traders and buyers. However, in absorbing the aspirations of the community regarding the market, the government's response has not been maximized as seen from the lack of market infrastructure and disturbing the comfort of market visitors. The obstacles in the development planning process are basically the advancement of technology and regional information systems and public awareness, in this case, sellers at Binaya Market who have not been disciplined in maintaining the cleanliness and tidiness of the market, as well as the government which in organizing musrenbang has not been optimal and market supervision and market management are not optimal.

**Keywords:** Role of Bapplitbangda, Development Planning, Binaya Market, Central Maluku Regency

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Bagaimana Bapplitbangda turut berperan dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur pasar Binaya Masohi beserta kendala yang terjadi dalam pembangunan dan upaya yang dilakukan. Melihat bahwa pada kabupaten Maluku Tengah, Pasar Binaya ini menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat sehingga penting untuk memperhatikan dan meningkatkan pembangunan terhadap pasar Binaya ini. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Bapplitbangda terhadap perencanaan pembangunan pada Pasar Binaya dan apa yang menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Peran Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi indikator tetapi belum maksimal. Namun, pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh adanya peranan dalam perencanaan pembangunan bahwa Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan Musrenbang dan menyerap aspirasi masyarakat dengan baik dan terarah. Dalam pembangunan pasar Binaya ini, perlu adanya peran dari masyarakat yang ada, baik dari pedagang ataupun dari pengunjung pasar ini, karena pemerintah juga dalam pengembangan pasar ini perlu sumbangsi pemikiran dari masyarakat agar supaya ada inovasi untuk pengembangan pasar ini. **Kesimpulan:** Peran Bapplitbangda dalam Perencanaan pembangunan infrastruktur Pasar Binaya belum sepenuhnya maksimal dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Binaya. Namun demikian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan daerah berjalan dengan baik. Dalam pembangunan pasar masyarakat sudah mampu untuk melakukan transaksi jual beli yang baik melalui hubungan emosional yang terjalin antar pedagang dan pembeli. Namun dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai Pasar, respon pemerintah belum maksimal dilihat dari sarana prasarana pasar yang kurang dan mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung Pasar. Hambatan dalam proses perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah pada kemajuan teknologi dan sistem informasi daerah dan kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah penjual pada Pasar Binaya yang belum disiplin dalam menjaga kebersihan dan kerapian Pasar, juga pemerintah yang dalam penyelenggaraan musrenbang belum optimal dan pengawasan pasar serta pengelolaan pasar yang tidak maksimal. **Kata kunci:** Peran Bapplitbangda, Perencanaan Pembangunan, Pasar Binaya, Kabupaten Maluku Tengah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam rangka merespon pelaksanaan pembangunan, diterbitkanlah kebijakan otonomi daerah di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1945 ketika Indonesia telah meraih kemerdekaannya, pemerintah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pemerintah daerah. Dari masa orde baru dengan Undang-Undang No 5 tahun 1974 hingga terjadi krisis moneter dan fiskal di tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan perangkat hukum yaitu dengan Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang bertahan hanya lima tahun, kemudian Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pembangunan daerah tentunya berkaitan dengan adanya otonomi daerah, dan pemerintah harus memastikan bahwa kewenangan otonomi daerah dalam proses pembangunan



mengikuti prinsip-prinsip otonomi. Percepatan pertumbuhan dan pembangunan wilayah Indonesia memerlukan terciptanya keseimbangan dan pemahaman. Artinya mengenali bibit unggul dan potensi yang ada di daerah yang sedang dikembangkan. Kepekaan dan kreativitas pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan masyarakat dalam rangka pembangunan daerah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, sangat tergantung pada kemauan pemerintah daerah untuk mengelola sistem pemerintahan untuk menciptakan pembangunan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Proses pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan mengalami proses perubahan yang melibatkan sistem sosial, politik, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, pertanian dan teknologi, serta kelembagaan dan budaya. Kita semua tahu bahwa pembangunan bangsa saat ini dibantu oleh unsur pembangunan yang dikenal dengan membangun Indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada masa Reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah memberikan ruang lingkup yang luas bagi daerah untuk lebih mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kepentingan rakyatnya. Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut pembangunan infrastruktur. Secara umum, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor tersebut merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut, karena laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur. Kebijakan infrastruktur dapat digunakan sebagai strategi kunci bagi pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi. Pemerintah menarik perhatian publik pada infrastruktur dan menerapkan langkah-langkah pembangunan infrastruktur. Dalam sebuah pembangunan potensi yang dimiliki daerah serta apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan sangat mempengaruhi terwujudnya pemerataan pembangunan dan nantinya akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Agar tujuan tersebut bisa tercapai pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang akan program-program daerah, maka dari itu harus ada keserasian laju pertumbuhan di berbagai sektor antar daerah hingga antar kota.

BAPPLITBANGDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok yang telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2017 tentang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses dimana terdapat susunan-susunan tahapan untuk pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang dimiliki agar meningkatnya kesejahteraan sosial di suatu wilayah atau daerah pada waktu tertentu secara otoritas yang bersifat menyeluruh dan berpedoman pada azas prioritas.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pasar Binaya Masohi adalah salah satu pasar yang terdapat di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Pasar ini merupakan pusat perbelanjaan masyarakat Kota Masohi dan masyarakat Maluku Tengah pada umumnya. Pasar ini tepatnya berada di jalan poros samping terminal Binaya Kota Masohi di dalam pasar Binaya ini berjejeran bilik yang menjual berbagai jenis barang dagangan mulai dari pakaian, sepatu/sandal, alat elektronik, sembako, sayuran dan buah-buahan DLL. Sebagai pusat perdagangan di Kota Masohi seharusnya pasar binaya telah dibangun sedemikian rupa agar proses perdagangan berjalan lancar. Tetapi hal tersebut berbeda dengan yang ada di lapangan, menginjak angka 60-an sdh usia kota masohi sekarang. Pembangunan pasar binaya yang di janji-janjikan tidak ada perubahan yang signifikan. Tata letak pasar yang dari dulu tidak pernah berubah dan ada sebuah bangunan plaza yang dulunya bernama Masohi Plaza tetapi tidak selayaknya plaza, dan sekarang bangunan tersebut telah berganti nama menjadi pasar binaya. Kemudian masalah para pedagang Kaki Lima di pasar Binaya juga dirasakan pada ketersediaan lahan yang terbatas sedangkan

pertumbuhan penjual meningkat. Tata letak pasar yang kurang baik mengakibatkan banyak pedagang mengambil tempat seandainya di pinggir jalan sehingga mempersempit akses jalan kaki dan kendaraan. Kesadaran akan kebersihan juga masih kurang, masih banyak sampah dibuang sembarangan yang dibiarkan berhari-hari tidak langsung diangkat hingga mengakibatkan bau tidak sedap. Juga pada para pedagang ikan yang penataannya dalam berjualan masih tidak teratur. Pemerintah Daerah dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah yang mempunyai misi untuk menjamin berfungsinya penunjang urusan pemerintahan di daerah. Baplitbangda sendiri merupakan lembaga yang membuat penetapan benteng yang kemudian benteng tersebut nantinya akan disahkan secara politis sebagai sebuah dokumen. Pelaksanaan Baplitbangda selalu berkoordinasi dengan seluruh DPO lainnya, pihak swasta dan pelaku masyarakat yang juga terlibat dalam menjalankan proses pembangunan dan harus dapat bekerja serta selaras dengan kebutuhan di lapangan. Jadi, dalam struktur organisasi, Baplitbangda memiliki bagian dan bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pembangunan infrastruktur yang ada di Pasar Binaya sebagai isu permasalahan yang peneliti gambarkan sangat perlu untuk diatasi secara efektif. Peranan Baplitbangda yang efektif sangat berdampak bagi perencanaan pembangunan yaitu infrastruktur di Pasar Binaya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, berikut deskripsi beberapa penelitian, pada penelitian oleh Manuel Pieter Stenly Arfayan (2021) yang menjadi persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana peranan Bappeda dalam pembangunan infrastruktur Pasar juga kesamaan pada penggunaan metode penelitian dengan deskriptif kualitatif dan penggunaan Teknik *purposive sampling*, perbedaannya ada pada lokasi pasar yang diteliti dimana Manuel Pieter pada pasar Sore Tapioka di provinsi Papua dan peneliti dengan Pasar Binaya di Maluku Tengah. Perbedaan juga terlihat pada teori penelitian yang dipakai. Penelitian Manuel Pieter menggunakan Teori Efektivitas sedangkan Peneliti memakai teori Peran. Berikutnya penelitian oleh Henrawan (2021) persamaannya yaitu sama-sama meneliti peran Bappeda dalam pembangunan infrastruktur tetapi berbeda dengan peneliti yang lebih fokus pada peran dalam perencanaan infrastruktur Pasar saja. sedangkan Henrawan berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur Kota. Kemudian pada penelitian Syamsidar (2020) juga meneliti tentang peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mengetahui peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan kota Makassar sedangkan peneliti untuk mengetahui peran dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pasar Binaya.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada Efektivitas Peran Bappeda. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Manuel Pieter Stenly Arfayan tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2012:213). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan manajemen pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Baplitbangda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Pasar Binaya Masohi di Kabupaten Maluku Tengah, mengetahui hambatan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Pasar Binaya Masohi di Kabupaten Maluku Tengah, mengetahui upaya yang dilakukan Baplitbangda dalam pembangunan infrastruktur Pasar Binaya Masohi di Kabupaten Maluku Tengah



## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPLITBANGDA) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pasar binaya, dengan datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPLITBANGDA) di Masohi Kabupaten Maluku Tengah.. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dampak pembakaran batu kapur.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 19 orang yang diambil dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah Maluku Tengah, koordinator pasar binaya, dan penjual di pasar Binaya Masohi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori Peran menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peran adalah aspek dinamis dari posisi (status). Peran adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tergantung pada status yang dipegangnya. Meskipun setiap tindakan mewakili peran sesuai dengan yang diembannya, tetapi dalam koridor regulasi yang berbeda yang membuat hasil peran setiap orang berbeda. Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa definisi peran lebih mengacu pada tindakan, adaptasi dan proses, sehingga secara tepat seseorang mengambil posisi atau tempat dalam masyarakat dan memenuhi peran. Teori ini didukung dengan tiga variabel yang menjadi pusat perhatian yaitu peran meliputi norma-norma, peran adalah suatu konsep, peran sebagai perilaku individu. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

### **3.1. Peran Meliputi Norma-Norma**

Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Musrenbang ini dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum masa periode RPJPD berakhir. Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan jugamengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Dalam proses menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini dikaji pula sistem perundangan yang terkait dengan rencana pembangunan baik produk hukum maupun NSPM (Norma-Standar-Pedoman-Manual). Dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 disusun melalui tahapan: (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Perumusan rancangan; (4) Pelaksanaan musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah

(Renja OPD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

### **3.2. Peran Adalah Suatu Konsep**

Pada Tahun 2021 dilakukan perbaikan pembangunan pada pasar Binaya terlihat dengan adanya perkembangan pada bangunan plaza di pasar binaya dilakukan rehabilitasi dengan dana sebesar 12 milyar, kemudian setelah dilakukan ULP/ pelelangan, dana yang didapat menjadi 11,6 milyar. Dan pada tahun yang sama dilakukan juga penambahan bangunan kios sejumlah 9 kios, jadi wilayah bangunan pada pasar menjadi berkembang luas. Pada pasar Binaya ini jumlah pedagang yang ada pasar atau kios sejumlah 1.404 orang. Adapun Fasilitas Pasar yang dimiliki pada Pasar Binaya yaitu: Parkiran, Mushola, Toilet dan wastofel, Tempat pembuangan sampah sementara Fasilitas yang dimiliki dianggap kurang memadai seperti toilet umum yang disediakan jarang dibersihkan, mushola yang tidak terawat, kios serta lahan parkir yang sempit dan mengambil sebagian badan jalan, akibat toilet umum dan mushola yang tidak terawat para pengunjung pasar lebih memilih untuk sholat diluar dan tidak menggunakan toilet karena tidak mengalirnya air dan air bersih yang sulit diperoleh, tempat pembuangan sampah sementara yang kurang memadai, sehingga banyak tumpukan sampah disekitar lapak pedagang. Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah memiliki tugas dan fungsi untuk membuat dokumen perencanaan yang dianggap sebagai pedoman arah pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Dokumen perencanaan ini merupakan produk atau hasil dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Akan semakin efektif pekerjaan di dalam lingkup organisasi Bapplitbangda apabila ditunjang dengan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan beradaptasi atau dapat menggunakan sistem informatika/teknologi. Dengan sistem informatika maka semua data dan informasi dapat diolah dengan lebih mudah dalam sinkronisasi. Data-data serta informasi yang sinkron akan menjadi dasar dalam pembangunan dan pengembangan daerah termasuk pembangunan Infrastruktur di Pasar Binaya Masohi.

### **3.3. Peran Sebagai Perilaku Individu**

Pemerintah dituntut supaya cepat merespon setiap permasalahan yang ada dalam pembangunan pasar Binaya ini. Salah satu yang harus di perhatikan oleh pemerintah yaitu harus memperhatikan dan menjalankan setiap program yang telah di rencanakan untuk bisa mengembangkan pasar Binaya Masohi. Begitu banyak program dan inovasi yang telah di atur namun belum semua di eksekusi. Seperti program pembinaan kepada setiap pedagang yang tujuan untuk bisa mengelola pasar ini dengan baik, namun belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini memberi dampak yang buruk dan mengakibatkan pasar ini tidak bisa berkembang dengan baik. Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah. Hal yang belum bisa di respon cepat oleh pemerintah juga, yaitu mengenai sarana dan prasarana yang kurang, yang menjadi keluh kesah masyarakat, karena hal ini yang menjadi masalah utama pada pasar Langowan, dimana kurangnya fasilitas untuk berdagang sehingga banyak pedagang liar dan tidak dapat di atur dengan baik oleh pengelola pasar Binaya. Belum lagi masalah kebersihan pasar apalagi di bagian pasar ikan, yang jika di biarkan, akan berdampak pada kesehatan masyarakat, dan tentunya mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung pasar Binaya. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar agar supaya bisa mengembangkan pasar Binaya ini, namun nyatanya program yang di susun oleh pemerintah tidak semua berjalan dengan baik, buktinya saja bahwa pemerintah akan memberikan fasilitas bagi para pedagang yang ada, namun ternyata masih banyak pedagang yang tidak mendapat tempat untuk berjualan sehingga di Pasar Binaya ini banyak pedagang liar yang sudah memakai jalan untuk para pengunjung.



### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan perencanaan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten Maluku Tengah dari Tahun 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini menjadi panduan bagi pemerintah dan aparatur yang berkepentingan dalam menentukan arah pembangunan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi. Pada pasar masyarakat telah mampu melakukan tawar-menawar yang membuat penjual dengan pembeli saling bertegur sapa, sehingga secara tidak langsung akan membentuk kedekatan personal maupun emosional. Kemudian pada kualitas yang dikaitkan dengan kesegaran, misalnya untuk sayur-mayur, daging, dan ikan, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan bahan makanan segar dengan harga yang terjangkau. Kegiatan jual beli pada Pasar Binaya juga buka lebih pagi, bahkan sejak dinihari kegiatan di pasar sudah dimulai. Pada pasar juga masyarakat sudah mampu mengetahui akan adanya perubahan harga dan membandingkan harga antara penjual yang satu dengan penjual lainnya, dengan demikian masyarakat sebagai konsumen akan mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya, tentunya dengan harga yang lebih murah. Dari penelitian yang dilakukan peneliti melihat terdapat banyak interaksi yang ditemukan dalam pasar, dimana ada para pedagang pasar yang membeli suatu barang dagangan yang akan mereka jajakan di tokonya dalam jumlah yang besar dari agen, ada juga karena keterbatasan modal yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membeli barang-barang dalam jumlah yang besar dan tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyimpan barang dagangan terlalu banyak karena tidak memiliki lemari pendingin untuk menyegarkan barang dagangannya.

Dalam pembangunan pasar Binaya ini, perlu adanya peran dari masyarakat yang ada, baik dari pedagang ataupun dari pengunjung pasar ini, karena pemerintah juga dalam pengembangan pasar ini perlu sumbangsi pemikiran dari masyarakat agar supaya ada inovasi untuk pengembangan pasar ini. Namun nyatanya yang terjadi di lapangan, yaitu belum terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga proses pengembangan pasar Binaya ini belum berjalan dengan baik. Akibatnya sarana dan prasarana pasar Binaya masih jauh dari harapan, belum lagi masalah persampahan yang tidak di kelola dengan baik, hal ini tentunya sangat mengganggu pengunjung yang datang ke pasar. Kalau saja komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berjalan dengan baik, tentunya masalah – masalah seperti ini bisa dibicarakan dengan baik dan tentunya dapat menemukan jalan keluar.

Sama halnya dengan temuan Manuel Pieter S Arfayan, bahwa koordinasi antar stakeolder belum maksimal untuk pembangunan pasar, sehingga belum memadai juga belum memiliki sertifikasi tanah yang jelas (Manuel Pieter 2021). Berbeda halnya dengan temuan Henrawan bahwa Bappeda menunjukan Musrembang tingkat kelurahan sampai kecamatan sebagian sudah terakomodir dan juga ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan (Henrawan 2021).

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran dari pedagang itu sendiri dimana pedagang yang menempati kios memiliki latar belakang yang berbeda kadang ada pedagang yang disiplin mau mematuhi tata tertib dan mendengarkan arahan adapun beberapa pedagang yang tidak mau atau masa bodo, dan kebanyakan pedagang PKL yang sangat susah untuk diberikan arahan dan tidak mau ditertibkan, kemudian kurangnya kedisiplinan pedagang terhadap pembayaran retribusi dan memelihara kebersihan kios dan lapak mungkin dikarenakan kurang memuaskannya fasilitas yang ada didalam pasar sehingga mempengaruhi pedagang dalam hal pembayaran retribusi dan

pemeliharaan kebersihan kios pedagang.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Maluku Tengah yaitu Peran Bapplitbangda dalam Perencanaan pembangunan infrastruktur Pasar Binaya belum sepenuhnya maksimal dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Binaya. Namun demikian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan daerah berjalan dengan baik. Dalam pembangunan pasar masyarakat sudah mampu untuk melakukan transaksi jual beli yang baik melalui hubungan emosional yang terjalin antar pedagang dan pembeli. Namun dalam menyerap aspirasi masyarakat mengenai Pasar, respon pemerintah belum maksimal dilihat dari sarana prasarana pasar yang kurang dan mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung Pasar. Hambatan dalam proses perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah pada kemajuan teknologi dan sistem informasi daerah dan kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah penjual pada Pasar Binaya yang belum disiplin dalam menjaga kebersihan dan kerapian Pasar, juga pemerintah yang dalam penyelenggaraan musrenbang belum optimal dan pengawasan pasar serta pengelolaan pasar yang tidak maksimal.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dalam penelitian sehingga data dan informasi yang didapatkan belum cukup lengkap untuk menjawab seluruh aspek penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Maluku Tengah, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana, Mulyana, and Manuel Pieter Stenly Arfayan. *"Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua."* Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 11.1 (2021).
- Henrawan, H. (2021). *Peran Bappeda dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare Perspektif Siyasa Idariyah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 212-214
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- SYAMSIDAR. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pembangunan Kota Makassar*. UMM Makassar, 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



